



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/PMK.07/2022
TENTANG
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI
WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, telah diatur bahwa Provinsi Papua Barat Daya berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa dalam hal undang-undang pembentukan daerah baru diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan, dana transfer ke daerah untuk daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari dana transfer ke daerah yang dialokasikan untuk daerah induk;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, telah diatur bahwa pengalokasian anggaran transfer ke daerah kepada daerah pemekaran di wilayah Papua dihitung secara proporsional dari alokasi masing-masing anggaran transfer ke daerah daerah induk;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, telah diatur bahwa tata cara perhitungan dan hasil perhitungan berupa rincian anggaran transfer ke daerah untuk daerah induk dan daerah baru ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI TRANSFER KE DAERAH UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah otonom.
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
5. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
6. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

7. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah otonom berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

- (1) Alokasi TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU;
 - c. DAK;
 - d. Dana Otonomi Khusus; dan
 - e. Dana Desa.
- (2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. DAK fisik;
 - b. DAK nonfisik; dan
 - c. hibah kepada daerah.
- (3) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Insentif Fiskal.

Pasal 3

Alokasi TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hasil perhitungan alokasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa rincian alokasi TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rincian alokasi TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215) dirinci menjadi rincian alokasi TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1329

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 17001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/PMK.07/2022
TENTANG
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH UNTUK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI
PAPUA BARAT DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN
ANGGARAN 2023

A.1 RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	PPH PASAL 21	PPH PASAL 25/29	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Provinsi Papua Barat	18.892.133	497.109	19.389.242
2	Kab. Fak Fak	2.623.363	99.061	2.722.424
3	Kab. Manokwari	11.019.476	194.231	11.213.707
4	Kab. Teluk Bintuni	22.259.969	487.518	22.747.487
5	Kab. Teluk Wondama	1.971.850	61.997	2.033.847
6	Kab. Kaimana	2.281.393	55.965	2.337.358
7	Kab. Manokwari Selatan	1.886.930	41.349	1.928.279
8	Kab. Pegunungan Arfak	1.669.835	38.192	1.708.027
9	Provinsi Papua Barat Daya	20.418.472	537.271	20.955.743
10	Kab. Sorong	6.288.144	77.689	6.365.833
11	Kab. Sorong Selatan	1.974.230	44.751	2.018.981
12	Kab. Raja Ampat	2.428.750	38.756	2.467.506
13	Kab. Tambrauw	1.575.435	38.192	1.613.627
14	Kab. Maybrat	1.892.456	38.208	1.930.664
15	Kota Sorong	10.128.804	579.549	10.708.353

A.2 RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(4)+(5)+(6)+(7)
1	Provinsi Papua Barat	1.193.052	1.597.560	65.623.599	1.568.304	88.602	70.071.117
2	Kab. Fak Fak	1.462.889	622.546	27.171.052	132.169	62.018	29.450.674
3	Kab. Manokwari	1.023.514	133.439	6.378.915	427.190	62.018	8.025.076
4	Kab. Teluk Bintuni	2.011.668	4.967.859	410.282.585	125.537	59.434	417.447.083
5	Kab. Teluk Wondama	93.424	2.078.558	5.841.336	122.808	58.142	8.194.268
6	Kab. Kaimana	169.296	4.048.193	6.287.262	122.808	58.142	10.685.701
7	Kab. Manokwari Selatan	93.424	125.099	6.116.917	142.838	58.142	6.536.420
8	Kab. Pegunungan Arfak	93.424	125.099	6.921.629	122.808	58.142	7.321.102
9	Provinsi Papua Barat Daya	774.451	1.037.031	42.598.501	1.018.040	57.515	45.485.538
10	Kab. Sorong	4.231.237	539.056	77.702.685	133.725	63.310	82.670.013
11	Kab. Sorong Selatan	982.962	397.690	5.950.551	122.808	58.142	7.512.153
12	Kab. Raja Ampat	93.424	125.099	6.286.368	11.606.229	58.142	18.169.262
13	Kab. Tambrauw	121.407	125.099	6.430.040	122.808	58.142	6.857.496
14	Kab. Maybrat	252.028	414.729	6.244.039	122.808	58.142	7.091.746
15	Kota Sorong	99.652	133.439	5.932.063	130.996	62.018	6.358.168

A.3 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	CUKAI HASIL TEMBAKAU
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Papua Barat	-
2	Kab. Fak Fak	-
3	Kab. Manokwari	-
4	Kab. Teluk Bintuni	-
5	Kab. Teluk Wondama	-
6	Kab. Kaimana	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	-
10	Kab. Sorong	-
11	Kab. Sorong Selatan	-
12	Kab. Raja Ampat	-
13	Kab. Tambrauw	-
14	Kab. Maybrat	-
15	Kota Sorong	-

A.4 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			GAS BUMI			JUMLAH
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (5)+(8)
1	Provinsi Papua Barat	9.369.027	277.506.490	286.875.517	110.400.493	1.185.005.282	1.295.405.775	1.582.281.292
2	Kab. Fak Fak	3.179.581	-	3.179.581	63.293.325	-	63.293.325	66.472.906
3	Kab. Manokwari	1.937.807	-	1.937.807	26.639.974	-	26.639.974	28.577.781
4	Kab. Teluk Bintuni	23.461.891	-	23.461.891	686.400.298	-	686.400.298	709.862.189
5	Kab. Teluk Wondama	3.179.581	-	3.179.581	63.293.325	-	63.293.325	66.472.906
6	Kab. Kaimana	3.179.581	-	3.179.581	63.293.325	-	63.293.325	66.472.906
7	Kab. Manokwari Selatan	3.179.581	-	3.179.581	63.293.325	-	63.293.325	66.472.906
8	Kab. Pegunungan Arfak	3.179.581	-	3.179.581	63.293.325	-	63.293.325	66.472.906
9	Provinsi Papua Barat Daya	6.081.752	180.138.860	186.220.612	71.664.698	769.227.058	840.891.756	1.027.112.368
10	Kab. Sorong	43.392.440	-	43.392.440	34.781.841	-	34.781.841	78.174.281
11	Kab. Sorong Selatan	6.231.039	-	6.231.039	64.017.047	-	64.017.047	70.248.086
12	Kab. Raja Ampat	4.989.265	-	4.989.265	27.363.695	-	27.363.695	32.352.960
13	Kab. Tambrau	6.231.039	-	6.231.039	64.017.047	-	64.017.047	70.248.086
14	Kab. Maybrat	6.231.039	-	6.231.039	64.017.047	-	64.017.047	70.248.086
15	Kota Sorong	4.989.265	-	4.989.265	27.363.695	-	27.363.695	32.352.960

A.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Provinsi Papua Barat	181.737	10.520.030	10.701.767
2	Kab. Fak Fak	-	1.813.225	1.813.225
3	Kab. Manokwari	11.708	1.813.225	1.824.933
4	Kab. Teluk Bintuni	-	1.813.225	1.813.225
5	Kab. Teluk Wondama	-	1.813.225	1.813.225
6	Kab. Kaimana	-	63.304.029	63.304.029
7	Kab. Manokwari Selatan	-	1.813.225	1.813.225
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	1.813.225	1.813.225
9	Provinsi Papua Barat Daya	117.972	6.828.908	6.946.880
10	Kab. Sorong	-	15.956.382	15.956.382
11	Kab. Sorong Selatan	-	1.813.225	1.813.225
12	Kab. Raja Ampat	530.632	39.528.309	40.058.941
13	Kab. Tambrauw	-	1.813.225	1.813.225
14	Kab. Maybrat	-	1.813.225	1.813.225
15	Kota Sorong	612	1.813.225	1.813.837

A.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (IIUPH)	PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)	DANA REBOISASI (DR)	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
1	Provinsi Papua Barat	-	11.583.074	33.002.382	44.585.456
2	Kab. Fak Fak	-	13.856.713	-	13.856.713
3	Kab. Manokwari	-	1.872.126	-	1.872.126
4	Kab. Teluk Bintuni	-	18.076.190	-	18.076.190
5	Kab. Teluk Wondama	-	8.002.538	-	8.002.538
6	Kab. Kaimana	-	16.168.576	-	16.168.576
7	Kab. Manokwari Selatan	-	3.444.921	-	3.444.921
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	2.478.603	-	2.478.603
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	7.518.965	21.422.963	28.941.928
10	Kab. Sorong	-	4.651.937	-	4.651.937
11	Kab. Sorong Selatan	-	2.809.777	-	2.809.777
12	Kab. Raja Ampat	-	1.917.364	-	1.917.364
13	Kab. Tambrau	-	2.882.292	-	2.882.292
14	Kab. Maybrat	-	2.838.351	-	2.838.351
15	Kota Sorong	-	1.896.102	-	1.896.102

A.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	PERIKANAN
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Papua Barat	-
2	Kab. Fak Fak	5.095.765
3	Kab. Manokwari	2.287.290
4	Kab. Teluk Bintuni	3.728.420
5	Kab. Teluk Wondama	4.730.772
6	Kab. Kaimana	5.927.672
7	Kab. Manokwari Selatan	1.866.160
8	Kab. Pegunungan Arfak	1.340.364
9	Provinsi Papua Barat Daya	-
10	Kab. Sorong	3.871.134
11	Kab. Sorong Selatan	2.379.859
12	Kab. Raja Ampat	19.205.629
13	Kab. Tambrauw	2.957.358
14	Kab. Maybrat	1.340.364
15	Kota Sorong	1.626.342

A.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-
2	Kab. Fak Fak	-	-	-	-
3	Kab. Manokwari	-	-	-	-
4	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-
5	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-
6	Kab. Kaimana	-	-	-	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-
10	Kab. Sorong	-	-	-	-
11	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-
12	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-
13	Kab. Tambrau	-	-	-	-
14	Kab. Maybrat	-	-	-	-
15	Kota Sorong	-	-	-	-

B. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PEMERINTAH DAERAH	DANA ALOKASI UMUM						TOTAL DAU
		DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA					
			PENGGAJIAN FORMASI PPPK	PENDANAAN KELURAHAN	BIDANG PENDIDIKAN	BIDANG KESEHATAN	BIDANG PEKERJAAN UMUM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Provinsi Papua Barat	447.670.686	42.014.005	0	24.874.626	30.303.471	101.068.797	645.931.585
2	Kab. Fak Fak	501.326.472	20.404.854	1.400.000	53.171.344	51.536.314	44.845.954	672.684.938
3	Kab. Manokwari	394.629.762	11.516.190	1.800.000	55.155.989	39.258.650	31.567.701	533.928.292
4	Kab. Teluk Bintuni	300.163.101	58.106.466	400.000	43.780.836	40.261.869	77.002.144	519.714.416
5	Kab. Teluk Wondama	309.447.950	6.708.048	200.000	48.167.399	43.999.959	35.315.504	443.838.860
6	Kab. Kaimana	377.716.454	35.213.412	400.000	86.702.777	52.613.042	42.297.862	594.943.547
7	Kab. Manokwari Selatan	237.497.645	10.159.524	0	31.630.001	27.266.024	30.145.494	336.698.688
8	Kab. Pegunungan Arfak	215.848.681	1.825.608	0	37.261.747	23.769.902	84.457.642	363.163.580
9	Provinsi Papua Barat Daya	425.031.953	39.889.355	0	23.616.715	28.771.022	95.957.742	613.266.787
10	Kab. Sorong	324.789.641	53.333.676	5.200.000	47.863.207	43.905.272	51.400.709	526.492.505
11	Kab. Sorong Selatan	273.447.674	25.852.536	400.000	53.613.983	32.779.234	71.723.477	457.816.904
12	Kab. Raja Ampat	372.549.474	80.609.064	800.000	94.979.966	58.390.232	65.436.759	672.765.495
13	Kab. Tambrauw	287.826.257	15.187.308	0	49.769.723	41.153.188	89.494.372	483.430.848
14	Kab. Maybrat	276.486.235	774.822	200.000	16.793.342	32.996.377	93.798.744	421.049.520
15	Kota Sorong	399.266.461	20.635.308	8.200.000	39.836.208	36.155.811	7.300.000	511.393.788

C.1 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	PENDIDIKAN			
		PAUD	SD	SMP	SKB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-
2	Kab. Fak Fak	-	7.947.928	4.792.999	-
3	Kab. Manokwari	651.758	16.589.412	11.535.534	-
4	Kab. Teluk Bintuni	326.869	2.490.270	1.995.542	850.640
5	Kab. Teluk Wondama	-	4.010.987	2.205.171	718.940
6	Kab. Kaimana	718.636	5.032.150	1.878.045	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-	10.954.334	1.350.908	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	27.982.659	6.116.990	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-
10	Kab. Sorong	1.030.492	10.486.871	10.436.557	-
11	Kab. Sorong Selatan	-	11.327.000	10.805.679	-
12	Kab. Raja Ampat	388.827	24.116.811	8.101.646	-
13	Kab. Tambrauw	-	11.404.957	15.038.254	-
14	Kab. Maybrat	-	6.972.966	8.420.724	-
15	Kota Sorong	623.530	1.402.687	2.745.551	-

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	PENDIDIKAN				
		SMA	SLB	SMK	PERPUSTAKAAN DAERAH	SUBTOTAL PENDIDIKAN
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-
2	Kab. Fak Fak	-	-	-	-	12.740.927
3	Kab. Manokwari	22.003.262	-	4.882.335	-	55.662.301
4	Kab. Teluk Bintuni	21.066.759	-	-	-	26.730.080
5	Kab. Teluk Wondama	10.382.725	-	-	-	17.317.823
6	Kab. Kaimana	-	-	-	-	7.628.831
7	Kab. Manokwari Selatan	4.266.930	-	9.383.568	-	25.955.740
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	2.984.442	-	37.084.091
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
10	Kab. Sorong	4.415.017	-	4.367.497	508.096	31.244.530
11	Kab. Sorong Selatan	3.962.825	-	7.225.924	-	33.321.428
12	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-	32.607.284
13	Kab. Tambrauw	4.825.345	-	-	-	31.268.556
14	Kab. Maybrat	2.856.997	-	-	1.016.193	19.266.880
15	Kota Sorong	6.219.296	-	3.457.340	-	14.448.404

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	KESEHATAN				
		PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN INTERVENSI STUNTING	PENGENDALIAN PENYAKIT	PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	KELUARGA BERENCANA	SUBTOTAL KESEHATAN
(1)	(2)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	34.051.755	-	34.051.755
2	Kab. Fak Fak	-	217.404	53.310.300	765.936	54.293.640
3	Kab. Manokwari	-	52.841	15.845.444	1.773.746	17.672.031
4	Kab. Teluk Bintuni	-	477.848	77.249.369	478.710	78.205.927
5	Kab. Teluk Wondama	491.865	-	95.214.718	727.179	96.433.762
6	Kab. Kaimana	1.806.416	113.231	3.284.879	322.499	5.527.025
7	Kab. Manokwari Selatan	655.820	-	622.737	812.730	2.091.287
8	Kab. Pegunungan Arfak	1.475.594	-	16.752.777	-	18.228.371
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
10	Kab. Sorong	-	698.573	94.697.565	1.069.382	96.465.520
11	Kab. Sorong Selatan	-	-	67.975.240	846.560	68.821.800
12	Kab. Raja Ampat	5.718.926	639.127	19.713.222	720.584	26.791.859
13	Kab. Tambrauw	325.099	92.374	67.745.046	846.560	69.009.079
14	Kab. Maybrat	3.368.230	336.981	95.274.385	727.179	99.706.775
15	Kota Sorong	7.521.062	-	2.107.721	765.936	10.394.719

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	JALAN					SUBTOTAL JALAN
		JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	TEMATIK PENGUATAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS	TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI	TEMATIK PENGEMBANGAN <i>FOOD ESTATE</i>	TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	
(1)	(2)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Provinsi Papua Barat	2.802.716	11.805.360	3.359.339	-	-	17.967.415
2	Kab. Fak Fak	15.805.604	-	12.101.368	-	-	27.906.972
3	Kab. Manokwari	21.955.041	14.640.092	16.167.928	-	-	52.763.061
4	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Teluk Wondama	21.042.099	12.492.142	15.866.853	-	-	49.401.094
6	Kab. Kaimana	-	-	14.789.413	-	-	14.789.413
7	Kab. Manokwari Selatan	21.377.700	-	15.734.111	-	-	37.111.811
8	Kab. Pegunungan Arfak	24.699.173	-	16.102.472	-	-	40.801.645
9	Provinsi Papua Barat Daya	12.243.397	2.182.379	10.155.030	-	23.287.931	47.868.737
10	Kab. Sorong	22.940.955	15.587.467	17.202.202	-	26.457.300	82.187.924
11	Kab. Sorong Selatan	20.568.274	-	15.179.574	-	-	35.747.848
12	Kab. Raja Ampat	20.001.789	12.311.672	14.798.968	-	23.674.315	70.786.744
13	Kab. Tambrauw	23.985.082	15.771.902	17.442.335	-	-	57.199.319
14	Kab. Maybrat	18.366.199	-	14.642.891	-	-	33.009.090
15	Kota Sorong	-	13.490.669	-	-	-	13.490.669

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	AIR MINUM			SANITASI			PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	AIR MINUM Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	SUBTOTAL AIR MINUM	TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU	SANITASI Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	SUBTOTAL SANITASI	TEMATIK PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Fak Fak	-	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Manokwari	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Kaimana	-	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Sorong	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Tambrau	-	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Maybrat	-	-	-	-	-	-	-
15	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-	-

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	IRIGASI			PERTANIAN		
		TEMATIK PENGEMBANGAN <i>FOOD ESTATE</i>	TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	SUBTOTAL IRIGASI	TEMATIK PENGEMBANGAN <i>FOOD ESTATE</i>	TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	SUBTOTAL PERTANIAN
(1)	(2)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
1	Provinsi Papua Barat	-	20.900.623	20.900.623	-	16.726.482	16.726.482
2	Kab. Fak Fak	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Manokwari	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Kaimana	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	9.998.864	9.998.864	-	1.085.494	1.085.494
10	Kab. Sorong	-	5.721.339	5.721.339	-	513.143	513.143
11	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Raja Ampat	-	4.284.513	4.284.513	-	-	-
13	Kab. Tambrauw	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Maybrat	-	-	-	-	-	-
15	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERDAGANGAN	INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	PARIWISATA	LINGKUNGAN HIDUP
		TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	TEMATIK PENGUATAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS	TEMATIK PENGUATAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS	TEMATIK PENGUATAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS	TEMATIK PENGUATAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS
(1)	(2)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1	Provinsi Papua Barat	10.236.044	-	-	-	-
2	Kab. Fak Fak	-	-	-	-	-
3	Kab. Manokwari	-	-	7.017.501	4.496.527	4.749.494
4	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-
5	Kab. Teluk Wondama	-	-	1.555.434	12.217.281	2.970.652
6	Kab. Kaimana	-	-	-	-	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	26.709.006	-	-	-	-
10	Kab. Sorong	5.630.685	-	9.174.989	2.402.161	2.368.169
11	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-
12	Kab. Raja Ampat	9.394.293	-	4.976.951	4.461.855	3.420.688
13	Kab. Tambrauw	-	-	-	3.449.415	1.355.119
14	Kab. Maybrat	-	-	-	-	-
15	Kota Sorong	-	-	1.393.546	4.787.637	749.920

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	TRANSPORTASI PERAIRAN	TRANSPORTASI PERDESAAN	KEHUTANAN	USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN	TOTAL DAK FISIK
		Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i>	Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	
(1)	(2)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	99.882.319
2	Kab. Fak Fak	-	7.877.746	-	-	-	102.819.285
3	Kab. Manokwari	-	7.100.000	-	-	-	149.460.915
4	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	104.936.007
5	Kab. Teluk Wondama	-	12.999.189	-	-	-	192.895.235
6	Kab. Kaimana	-	8.240.068	-	-	-	36.185.337
7	Kab. Manokwari Selatan	-	12.502.926	-	-	-	77.661.764
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	10.946.713	-	-	-	107.060.820
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	85.662.101
10	Kab. Sorong	6.658.374	9.307.388	-	-	-	251.674.222
11	Kab. Sorong Selatan	-	6.630.794	-	-	-	144.521.870
12	Kab. Raja Ampat	9.489.586	9.992.655	-	-	-	176.206.428
13	Kab. Tambrauw	-	11.400.000	-	-	-	173.681.488
14	Kab. Maybrat	-	10.316.817	-	-	-	162.299.562
15	Kota Sorong	-	-	-	-	-	45.264.895

C.2 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)						TOTAL BOSP
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN		
		REGULER	KINERJA	REGULER	KINERJA	REGULER	KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Provinsi Papua Barat	252.000	36.250	0	0	0	0	288.250
2	Kab. Fak Fak	26.267.930	1.447.500	1.829.880	60.000	873.860	0	30.479.170
3	Kab. Manokwari	52.547.640	1.180.000	2.766.240	30.000	1.270.200	90.000	57.884.080
4	Kab. Teluk Bintuni	29.304.620	1.300.000	2.215.580	60.000	307.020	0	33.187.220
5	Kab. Teluk Wondama	13.044.410	815.000	707.440	0	91.790	45.000	14.703.640
6	Kab. Kaimana	21.010.340	560.000	1.262.170	60.000	645.700	0	23.538.210
7	Kab. Manokwari Selatan	10.741.410	370.000	692.560	0	136.440	0	11.940.410
8	Kab. Pegunungan Arfak	15.657.780	180.000	179.800	0	0	0	16.017.580
9	Provinsi Papua Barat Daya	1.105.680	111.250	0	0	0	0	1.216.930
10	Kab. Sorong	35.214.140	2.040.000	1.362.680	240.000	420.310	0	39.277.130
11	Kab. Sorong Selatan	19.745.700	540.000	703.780	0	517.960	0	21.507.440
12	Kab. Raja Ampat	25.950.430	805.000	1.151.820	0	445.570	0	28.352.820
13	Kab. Tambrau	9.581.030	495.000	344.190	0	311.260	45.000	10.776.480
14	Kab. Maybrat	6.438.400	485.000	195.360	0	36.070	0	7.154.830
15	Kota Sorong	51.264.650	2.072.500	1.432.080	150.000	324.880	0	55.244.110

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	TUNJANGAN GURU ASN DAERAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
		TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Provinsi Papua Barat	56.392	0	0	0	0
2	Kab. Fak Fak	23.478.035	1.369.500	5.612.710	0	0
3	Kab. Manokwari	26.562.063	2.527.851	3.230.321	0	0
4	Kab. Teluk Bintuni	8.308.143	1.249.500	4.443.331	0	0
5	Kab. Teluk Wondama	5.827.766	816.000	3.012.488	0	0
6	Kab. Kaimana	15.250.165	723.000	7.600.451	0	0
7	Kab. Manokwari Selatan	5.055.961	429.000	909.200	0	0
8	Kab. Pegunungan Arfak	0	697.500	7.296.676	0	0
9	Provinsi Papua Barat Daya	349.694	3.000	0	0	0
10	Kab. Sorong	34.350.735	1.558.000	13.034.718	0	0
11	Kab. Sorong Selatan	12.235.306	913.500	17.014.966	0	0
12	Kab. Raja Ampat	17.549.042	1.227.000	5.212.613	0	0
13	Kab. Tambrau	4.534.709	622.500	8.365.045	0	0
14	Kab. Maybrat	17.677.201	489.000	10.990.005	0	0
15	Kota Sorong	38.988.619	1.956.250	304.336	0	0

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)				BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
		BOK DINAS			BOK PUSKESMAS	
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Provinsi Papua Barat	5.347.443	0	0	0	0
2	Kab. Fak Fak	0	4.787.462	0	8.680.909	3.973.402
3	Kab. Manokwari	0	9.186.254	363.597	16.199.505	3.808.419
4	Kab. Teluk Bintuni	0	6.255.457	0	18.192.657	2.787.926
5	Kab. Teluk Wondama	0	4.338.534	0	5.927.160	3.043.863
6	Kab. Kaimana	0	5.029.130	0	7.760.461	2.000.232
7	Kab. Manokwari Selatan	0	10.129.303	0	4.726.349	2.117.695
8	Kab. Pegunungan Arfak	0	10.327.934	0	9.226.984	3.066.259
9	Provinsi Papua Barat Daya	4.583.523	0	0	0	0
10	Kab. Sorong	0	8.535.679	360.123	15.105.101	5.913.471
11	Kab. Sorong Selatan	0	6.579.802	0	15.179.323	3.256.990
12	Kab. Raja Ampat	0	5.667.034	273.525	18.738.063	3.260.307
13	Kab. Tambrau	0	3.145.423	0	6.694.225	5.102.389
14	Kab. Maybrat	0	5.575.510	0	14.239.704	4.938.751
15	Kota Sorong	0	5.052.995	367.971	10.964.931	2.356.690

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UMK	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Provinsi Papua Barat	1.676.063	0	0	438.800
2	Kab. Fak Fak	0	959.717	0	598.000
3	Kab. Manokwari	406.770	1.329.523	0	0
4	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	0
5	Kab. Teluk Wondama	0	1.934.530	0	438.800
6	Kab. Kaimana	0	0	0	0
7	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	0
8	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	0
9	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0
10	Kab. Sorong	457.770	1.769.730	0	0
11	Kab. Sorong Selatan	420.370	0	0	0
12	Kab. Raja Ampat	0	1.532.027	0	375.000
13	Kab. Tambrau	0	1.162.220	0	0
14	Kab. Maybrat	0	0	0	0
15	Kota Sorong	420.370	1.749.627	0	0

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	TOTAL DAK NONFISIK
(1)	(2)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Provinsi Papua Barat	1.029.100	0	0	8.836.048
2	Kab. Fak Fak	438.200	452.000	0	80.829.105
3	Kab. Manokwari	490.400	0	2.750.000	124.738.783
4	Kab. Teluk Bintuni	365.200	394.500	0	75.183.934
5	Kab. Teluk Wondama	500.800	509.500	2.000.000	43.053.081
6	Kab. Kaimana	438.200	568.075	0	62.907.924
7	Kab. Manokwari Selatan	480.000	469.025	0	36.256.943
8	Kab. Pegunungan Arfak	542.600	360.000	0	47.535.533
9	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	6.153.147
10	Kab. Sorong	511.300	475.000	3.500.000	124.848.757
11	Kab. Sorong Selatan	469.500	371.500	0	77.948.697
12	Kab. Raja Ampat	427.800	383.000	2.750.000	85.748.231
13	Kab. Tambrau	417.400	417.500	0	41.237.891
14	Kab. Maybrat	521.700	360.000	0	61.946.701
15	Kota Sorong	448.700	0	2.000.000	119.854.599

C.3 RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN				
		<i>INTEGRATED PARCIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRIGATION PROJECT (IPDMIP)</i>	<i>MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT</i>	<i>RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING UP INITIATIVE (READ-SI)</i>	<i>THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)</i>	<i>HIBAH AIR MINUM BERBASIS KINERJA/ NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-
2	Kab. Fak Fak	-	-	-	-	-
3	Kab. Manokwari	-	-	-	-	-
4	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-
5	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-	-
6	Kab. Kaimana	-	-	-	-	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-
10	Kab. Sorong	-	-	-	-	-
11	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-
12	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-	-
13	Kab. Tambrau	-	-	-	-	-
14	Kab. Maybrat	-	-	-	-	-
15	Kota Sorong	-	-	-	-	-

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		
		HIBAH AIR MINUM BERBASIS KINERJA BANTUAN PEMERINTAH AUSTRALIA	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH UNTUK KOTA PALEMBANG/ PALEMBANG CITY SEWERAGE PROJECT (PCSP)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	-
2	Kab. Fak Fak	-	-	-
3	Kab. Manokwari	-	-	-
4	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-
5	Kab. Teluk Wondama	-	-	-
6	Kab. Kaimana	-	-	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-
10	Kab. Sorong	-	-	-
11	Kab. Sorong Selatan	-	-	-
12	Kab. Raja Ampat	-	-	-
13	Kab. Tambrau	-	-	-
14	Kab. Maybrat	-	-	-
15	Kota Sorong	-	-	-

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PENERIMAAN DALAM NEGERI YANG DIHIBAHKAN (RM)					TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		NATIONWIDE WATER HIBAH PROGRAM			HIBAH SANITASI (AIR LIMBAH SETEMPAT)	HIBAH JALAN DAERAH	
		AIR MINUM PERKOTAAN (AMK)	AIR MINUM PEDESAAN (AMD)	SUBTOTAL			
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)	(16)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+ (13)+(14)+(15)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Fak Fak	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Manokwari	-	-	-	600.000	-	600.000
4	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Kaimana	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Sorong	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Tambrau	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Maybrat	-	-	-	-	-	-
15	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-

D. RINCIAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				
		DANA OTSUS BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	TOTAL DANA OTSUS	DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	TOTAL DANA OTSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)
1	Provinsi Papua Barat	199.627.880	249.534.850	449.162.730	562.779.516	1.011.942.246
2	Kab. Fak Fak	59.833.161	74.791.451	134.624.612	35.559.339	170.183.951
3	Kab. Manokwari	97.064.310	121.330.387	218.394.697	24.599.334	242.994.031
4	Kab. Teluk Bintuni	51.657.187	64.571.484	116.228.671	33.783.533	150.012.204
5	Kab. Teluk Wondama	60.211.412	75.264.264	135.475.676	42.535.274	178.010.950
6	Kab. Kaimana	56.533.562	70.666.953	127.200.515	43.783.655	170.984.170
7	Kab. Manokwari Selatan	54.150.132	67.687.666	121.837.798	17.202.196	139.039.994
8	Kab. Pegunungan Arfak	86.348.624	107.935.780	194.284.404	43.727.890	238.012.294
9	Provinsi Papua Barat Daya	188.691.351	235.864.189	424.555.540	531.947.877	956.503.417
10	Kab. Sorong	46.161.775	57.702.219	103.863.994	23.596.107	127.460.101
11	Kab. Sorong Selatan	64.824.650	81.030.813	145.855.463	36.880.084	182.735.547
12	Kab. Raja Ampat	98.205.026	122.756.283	220.961.309	64.187.278	285.148.587
13	Kab. Tambrau	55.616.469	69.520.586	125.137.055	49.143.645	174.280.700
14	Kab. Maybrat	86.696.554	108.370.692	195.067.246	43.185.732	238.252.978
15	Kota Sorong	88.775.345	110.969.181	199.744.526	10.984.816	210.729.342

E. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Fak Fak	142	68.871.013	38.274.031	5.284.400	5.479.929	117.909.373
3	Kab. Manokwari	163	80.332.214	37.675.878	1.691.008	6.262.776	125.961.876
4	Kab. Teluk Bintuni	115	56.350.901	38.404.019	1.109.724	4.436.133	100.300.777
5	Kab. Teluk Wondama	75	37.435.765	19.519.287	2.642.200	3.131.388	62.728.640
6	Kab. Kaimana	84	40.986.247	35.965.331	1.955.228	3.392.337	82.299.143
7	Kab. Manokwari Selatan	57	28.902.155	15.032.228	2.060.916	2.348.541	48.343.840
8	Kab. Pegunungan Arfak	166	79.273.300	38.940.436	1.532.476	5.219.125	124.965.337
9	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Sorong	226	103.690.648	51.510.879	2.060.916	7.098.010	164.360.453
11	Kab. Sorong Selatan	121	58.780.174	30.632.394	3.963.300	3.757.770	97.133.638
12	Kab. Raja Ampat	117	57.492.864	29.952.933	739.816	3.757.770	91.943.383
13	Kab. Tambrau	216	97.046.478	57.291.205	581.284	6.680.480	161.599.447
14	Kab. Maybrat	259	120.010.399	52.876.578	1.268.256	8.141.835	182.297.068
15	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-

F. RINCIAN INSENTIF FISKAL MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Papua Barat	-
2	Kab. Fak Fak	-
3	Kab. Manokwari	-
4	Kab. Teluk Bintuni	-
5	Kab. Teluk Wondama	-
6	Kab. Kaimana	-
7	Kab. Manokwari Selatan	-
8	Kab. Pegunungan Arfak	-
9	Provinsi Papua Barat Daya	-
10	Kab. Sorong	-
11	Kab. Sorong Selatan	-
12	Kab. Raja Ampat	-
13	Kab. Tambrau	-
14	Kab. Maybrat	-
15	Kota Sorong	-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001

